RINGKASAN EKSEKUTIF

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2019-2023

Dalam Kerangka Mewujudkan
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DAFTAR ISI

SEKILAS PERUBAHAN
RPJMD KALTIM 2019-2023

1 Opening

2 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KALTIM

3 PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM

4 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SEKILAS PERUBAHAN RPJMD KALTIM 2019-2023

Beberapa kondisi dan perubahan yang mendasar mengakibatkan sebagian ASUMSI tidak sesuai dan target-target dalam RPJMD tak akan tercapai.

Beberapa kondisi dan perubahan dimaksud antara lain: adanya perubahan kebijakan nasional (utamanya penetapan RPJMN 2020-2024), Pemindahan IKN, Pandemi Covid-19 dan penanganan dampak-dampaknya serta penurunan KAPASITAS pembiayaan pembangunan.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan capaian pembangunan baik penurunan IPM, peningkatan angka kemiskinan, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Perlu adanya penajaman, *refocusing* dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi, termasuk penentuan fokus-fokus wilayah pada kebijakan sektoral.

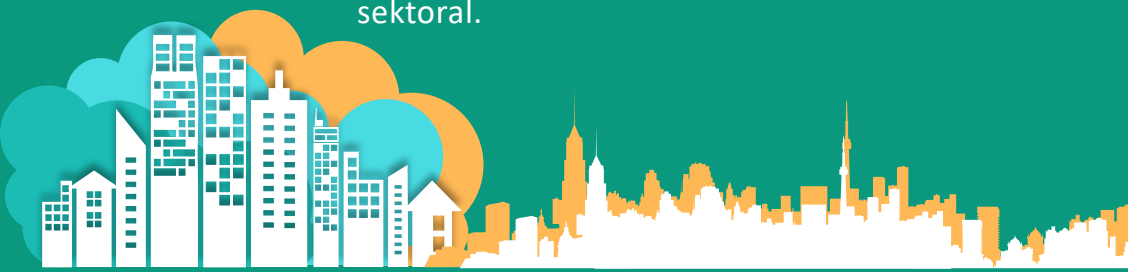

- Capaian Makro Pembangunan
- Permasalahan
- Isu Strategis
- Dampak COVID-19 (makro)
- Poin Penting Perubahan-RPJMD

1 Opening

IPM

76,24

PDRB

Per Kapita

175,65 Jt**

INDEKS

GINI

0,328%

2020

LPE

-4,61%*

Tingkat

PENGANGGURAN

6,87%

Tingkat Kemiskinan

6,10%

Capaian Indikator Makro

*s.d. tw 3-2020

** th 2019

Permasalahan

IPM

76,24

Meskipun secara nasional berstatus “tinggi”, namun dikarenakan Pandemi COVID-19 ini IPM Kaltim 2020 mengalami penurunan sebesar 0,37 poin dari tahun sebelumnya

IPM Menurut Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020

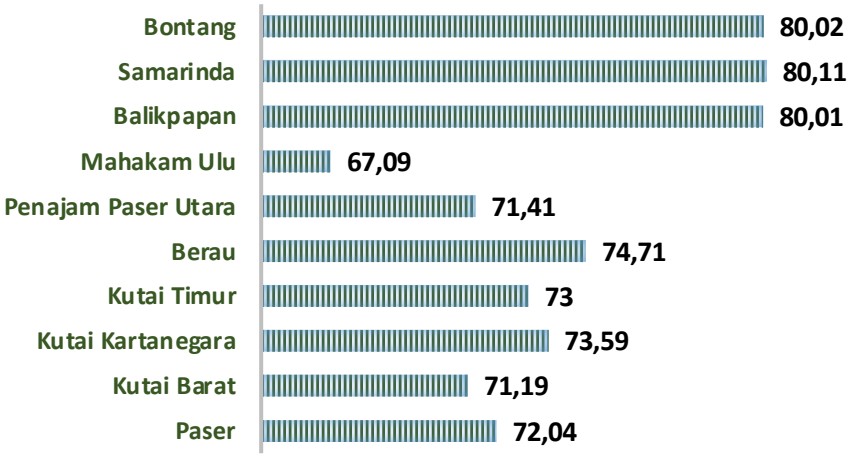

IPM Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

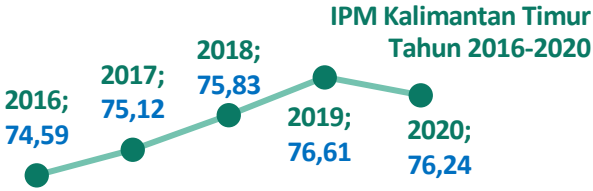

Tingginya ketimpangan daya saing SDM

Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar

KOMPONEN PENYUSUN IPM

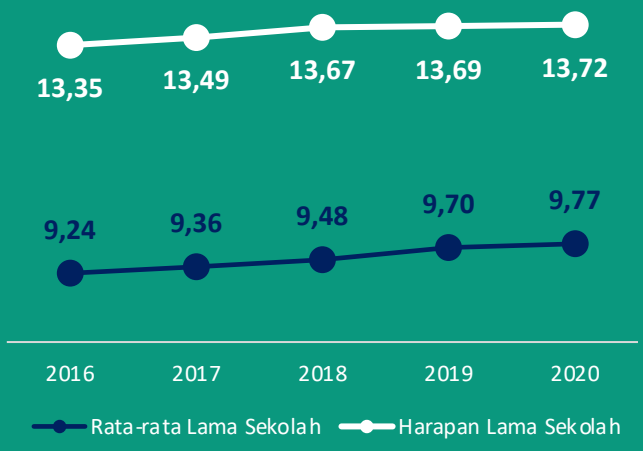

Rata-rata lama sekolah

Kaltim meningkat seiring peningkatan harapan lama sekolah. Terlihat bahwa harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas untuk menduduki jenjang pendidikan hingga mencapai 13,72 tahun masa pendidikan yang berarti hingga memasuki perguruan tinggi

Derajat kesehatan masyarakat

Kaltim mengalami peningkatan dimana terlihat bayi yang baru lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74,33 tahun

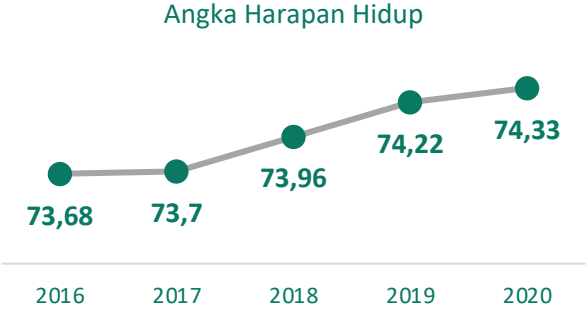

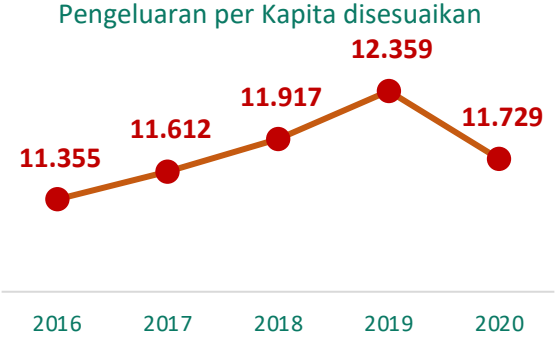

Penurunan angka IPM secara umum

disebabkan karena penurunan pengeluaran per kapita masyarakat hingga mencapai 11.729 ribu/tahun/kapita. Penurunan ini sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat

Permasalahan

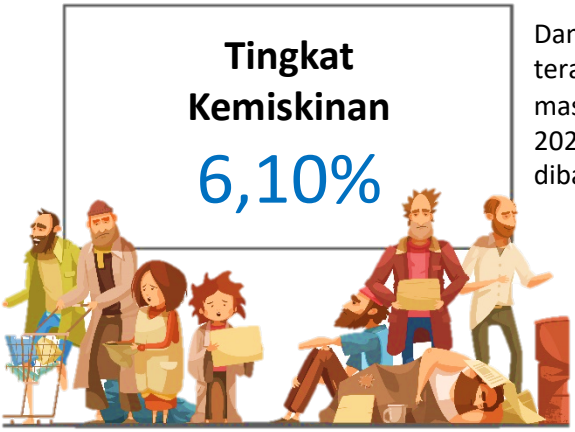

Dampak Pandemi COVID-19 sangat terasa dalam penurunan kesejahteraan masyarakat dimana Tingkat Kemiskinan 2020 meningkat menjadi 6,10 persen dibanding tahun lalu (5,94%)

Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020

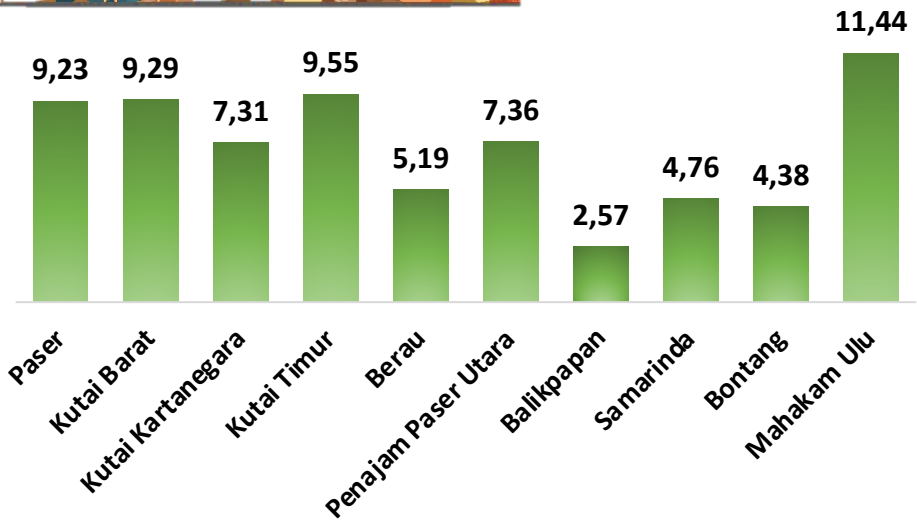

Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

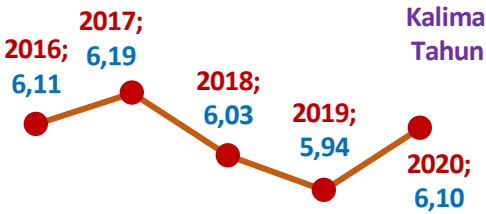

Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata

Permasalahan

LPE

-4,61%*

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi kembali dikarenakan Pandemi COVID-19 ini. Kategori ekonomi yang mampu bertahan hanya kategori jasa dalam tiga triwulan terakhir. Penanganan dan pemulihan yang cukup masif dibutuhkan dalam menggerakkan potensi perekonomian kembali.

Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020*

INDUSTRI PENGOLAHAN : 19,31%
KONSTRUKSI : 9,08%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN : 10,11%
LAINNYA : 13,58%
PERTANIAN : 9,02%
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN : 38,90%

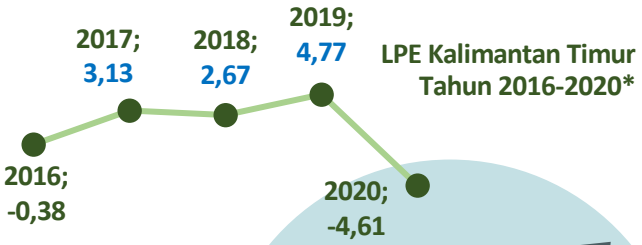

LPE Kalimantan Timur Tahun 2016-2020*

Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

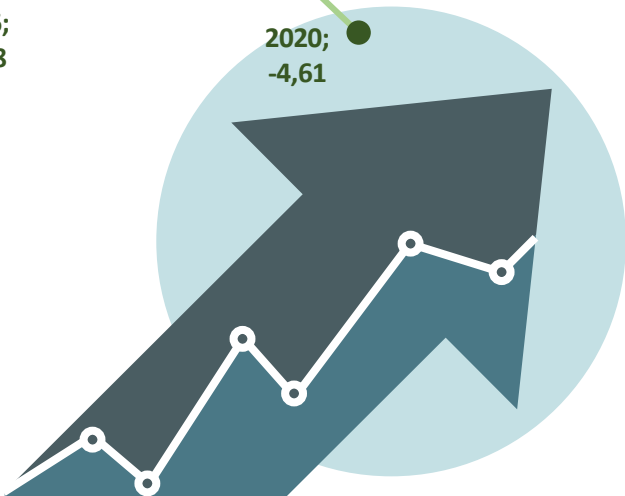

* s.d. triwulan III tahun 2020

ISU STRATEGIS

Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kaltim sebagai *hinterland* Ibu Kota Negara

Kaltim Sehat dalam Ketahanan Pangan, Perencanaan Reformasi Sosial, dan Pelayanan Publik dengan Tatanan Budaya New Normal

Dampak COVID-19 secara Makro

- Pengurangan jam kerja menjadi kebijakan yang paling banyak dilakukan oleh usaha yang masih beroperasi
- Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak memberhentikan pekerja dalam waktu singkat (bukan PHK)
- Secara umum, 8 dari setiap 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan
- Sektor Akomodasi dan makan-minum merupakan sektor yang paling terdampak COVID-19

POIN PERUBAHAN-RPJMD

BAB I	Penajaman latar belakang dengan kondisi pembangunan saat ini termasuk relevansi peraturan perundangan terbaru
BAB II	Memperbaharui data kinerja ter-*update*
BAB III	Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dengan asumsi *refocusing* anggaran
BAB IV	*Update* permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kaltim
BAB V	Memperbaharui kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk target capaian indikator pembangunan
BAB VI	Penajaman arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah
BAB VII	Implementasi program hasil pemetaan PMDB 90/2019 termasuk penyesuaian indikator dan target pembangunan Kaltim
BAB VIII	Memperbaharui indikator kinerja daerah terutama target yang dilakukan penyesuaian
BAB IX	Memperbaharui kaidah pelaksanaan

2

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KALTIM PERIODE 2019-2023

Berani untuk Kalimantan Timur BERDAULAT

1 PEMBANGUNAN SDM

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

2 PEMBERDAYAAN EKONOMI

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

3 PEMENUHAN INFRASTRUKTUR

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

4 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

5 REFORMASI BIROKRASI

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pandemi COVID-19 berakhir di tahun 2021

Struktur ekonomi Kaltim didominasi oleh pertambangan dan penggalian yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional

Anggaran penanganan dan pemulihan COVID-19 masih akan menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan hingga tahun 2023

Diproyeksikan pembangunan Nasional akan pulih pada tahun 2023 dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 5%, Kemiskinan menjadi kisaran 9%, *Job Creation* 1,5-2 juta, serta IPM dan Gini Ratio dengan progress positif

ASUMSI DASAR PENETAPAN TARGET MAKRO PEMBANGUNAN

PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA TUJUAN RPJMD

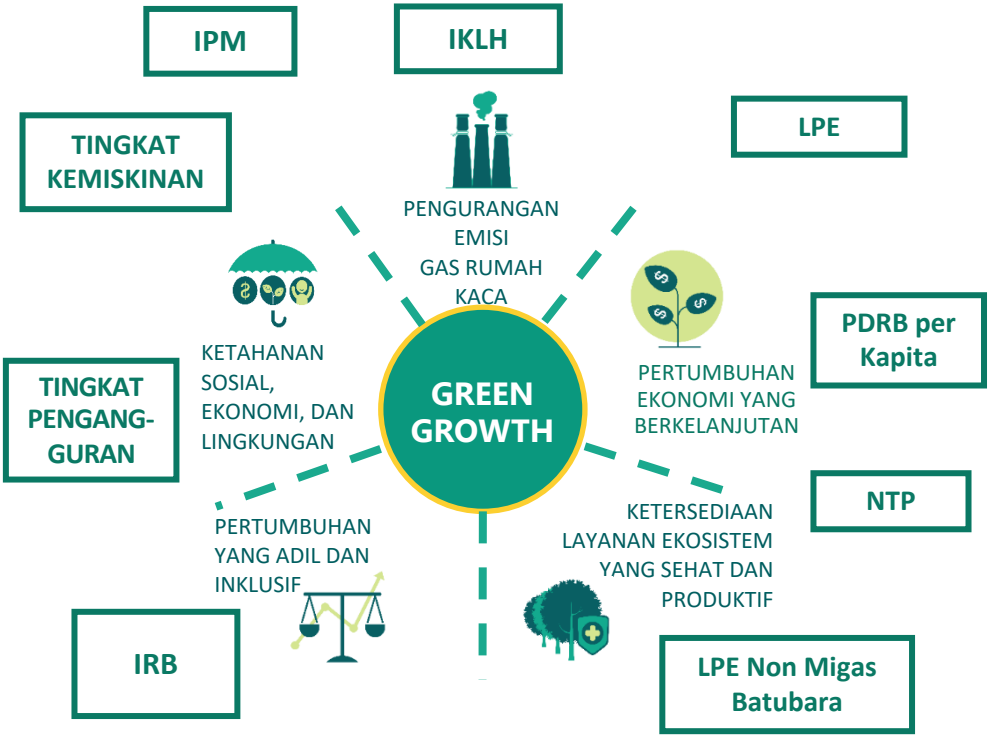

TARGET INDIKATOR MAKRO

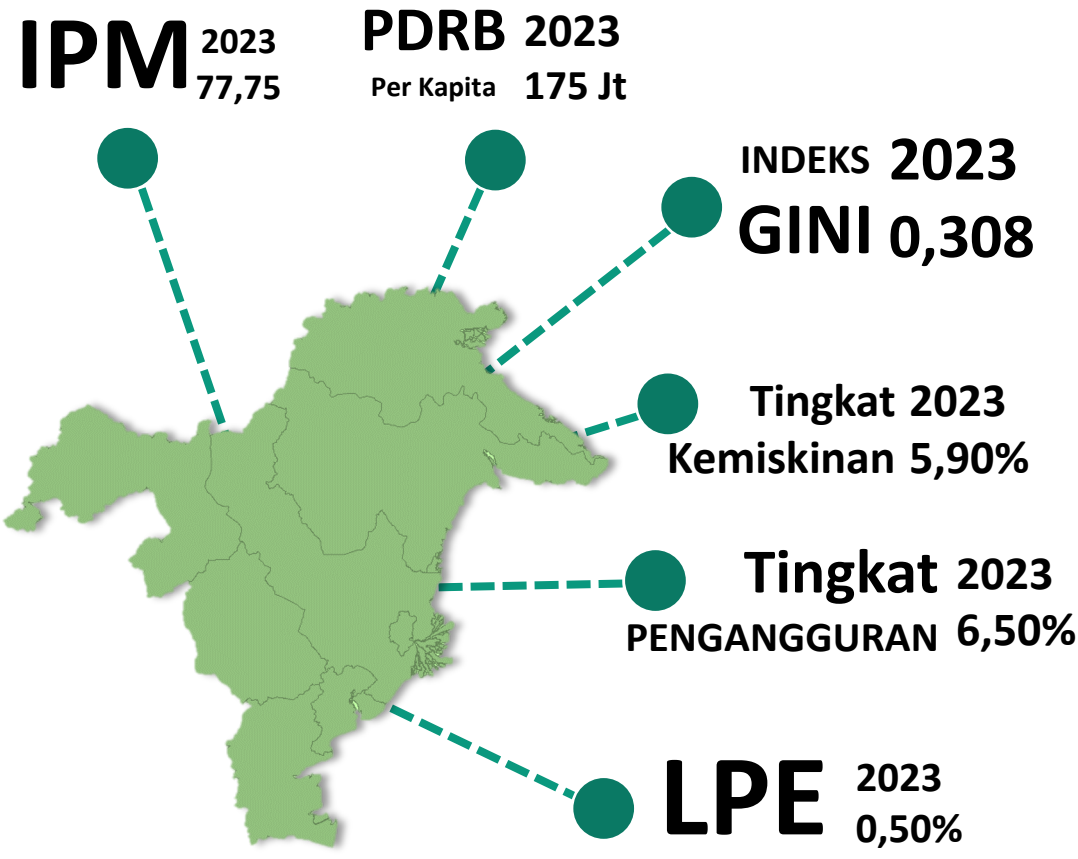

MISI 1

"Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas"

PERMASALAHAN POKOK 1
"Tingginya Ketimpangan Daya Saing SDM"

PERMASALAHAN POKOK 2
"Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata"

STRATEGI PENCAPAIAN MISI 1

- Peningkatan akses dan mutu pendidikan
- Peningkatan daya saing generasi muda
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Optimalisasi pengarusutamaan gender
- Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan
- Perluasan kesempatan kerja

MISI 2

"Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan"

PERMASALAHAN POKOK 3
"Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan"

STRATEGI PENCAPAIAN MISI 2

- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional
- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura
- Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak
- Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan
- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan
- Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan
- Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara
- Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM
- Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pengembangan ekonomi kreatif

MISI 3

"Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan"

PERMASALAHAN POKOK 4

"Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar"

STRATEGI PENCAPAIAN MISI 3

- Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan
- Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN
- Peningkatan infrastruktur sumber daya air
- Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh
- Peningkatan infrastruktur pengendali banjir
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
- Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal

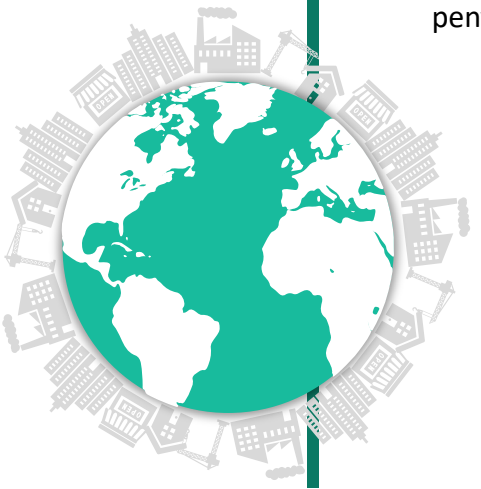

MISI 4

"Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan"

PERMASALAHAN POKOK 5
"Meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup"

STRATEGI PENCAPAIAN MISI 4

- Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana

MISI 5

"Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik"

PERMASALAHAN POKOK 6

"Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyaraka"

STRATEGI PENCAPAIAN MISI 5

- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko
- Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi

TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN

(target masih bersifat tentatif)

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN
Tujuan 1	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**75,83**	**77,75**
Sasaran 1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,67	14,13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,48	10,17
Sasaran 2	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	1,09
Sasaran 3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,96	74,75
Sasaran 4	Indeks Pembangunan Gender	85,63	86,69
Tujuan 2 :	**Tingkat Kemiskinan (%)**	**6,03**	**5,90**
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**6,6**	**6,50**
Sasaran 5	Indeks Desa Membangun	0,62	0,69
Sasaran 6	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	29,41	40,00
Tujuan 3:	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**2,67**	**0,50**
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	**174,43**	**175**
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	**5,95**	**2,5**
	Nilai Tukar Petani	**96,15**	**105**
Sasaran 7	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10,67	12,12
Sasaran 8	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	Rp 10.671.715. 200.465	1,89
Sasaran 9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara terhadap PDRB (%)	-	9

TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN

(target masih bersifat tentatif)

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN
Sasaran 10	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55	0,53
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,31	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,34	5,00
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,47	1,64
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,18	1,05
Sasaran 11	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	18,72	28,18
Sasaran 12	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,83	13,50
Sasaran 13	Laju pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	4,35	2,00

TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN

(target masih bersifat tentatif)

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN
Tujuan 4 :	**Indeks Gini**	**0,342**	**0,308**
Sasaran 13	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	7.970.602	8.100.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	2.261.862.440	370.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan ( )	2	7
	Cakupan layanan air minum layak (%)	52	70,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,50	16.925,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	512,93	1.000,50
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	267
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	83,10
	Rasio elektrifikasi (%)	85,75	95,00
Tujuan 5 :	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**85,9**	**76,15**
Sasaran 14	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	5,6	29,33
Sasaran 15	Indeks Resiko Bencana	165	150,49
Tujuan 6 :	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B (68,60)**	**B (72,00)**
Sasaran 16	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,22	83
Sasaran 17	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	78,3
Sasaran 18	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4
Sasaran 19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	2,49	3,54

TARGET MAKRO PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

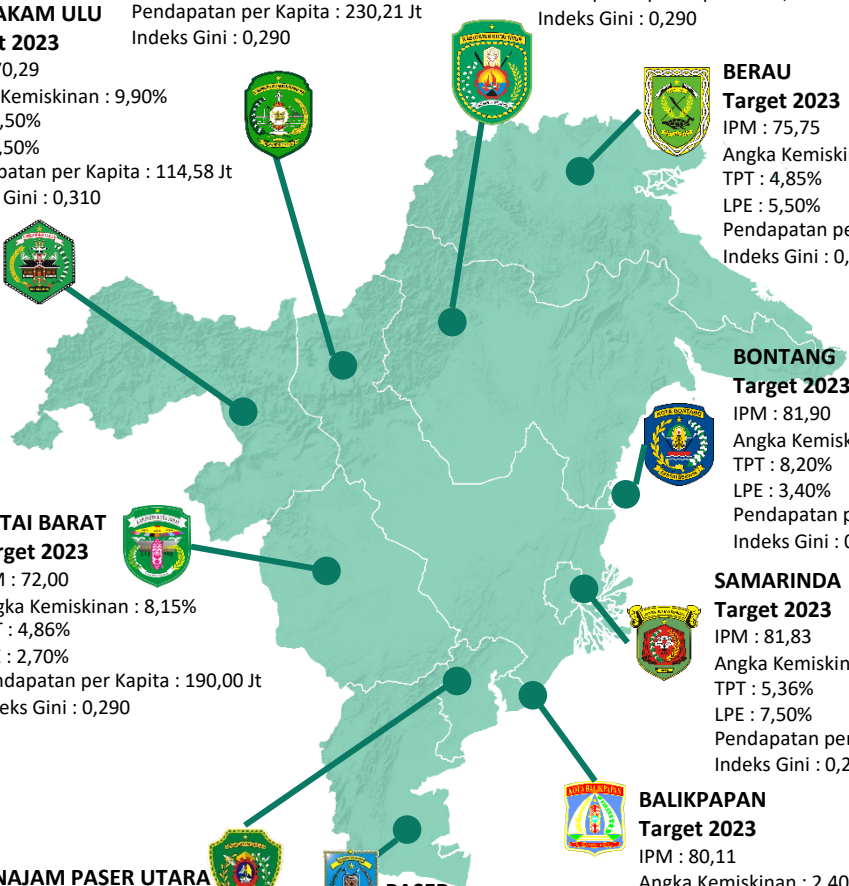

KUTAI KARTANEGARA
Target 2023
IPM : 75,85
Angka Kemiskinan : 6,50%
TPT : 4,65%
LPE : 12,83%
Pendapatan per Kapita : 230,21 Jt
Indeks Gini : 0,290

KUTAI TIMUR
Target 2023
IPM : 76,48
Angka Kemiskinan : 8,69%
TPT : 5,01%
LPE : 8,10%
Pendapatan per Kapita : 390,39 Jt
Indeks Gini : 0,290

MAHAKAM ULU
Target 2023
IPM : 70,29
Angka Kemiskinan : 9,90%
TPT : 3,50%
LPE : 6,50%
Pendapatan per Kapita : 114,58 Jt
Indeks Gini : 0,310

BERAU
Target 2023
IPM : 75,75
Angka Kemiskinan : 4,00%
TPT : 4,85%
LPE : 5,50%
Pendapatan per Kapita : 155,78 Jt
Indeks Gini : 0,290

BONTANG
Target 2023
IPM : 81,90
Angka Kemiskinan : 3,82%
TPT : 8,20%
LPE : 3,40%
Pendapatan per Kapita : 334,00 Jt
Indeks Gini : 0,300

KUTAI BARAT
Target 2023
IPM : 72,00
Angka Kemiskinan : 8,15%
TPT : 4,86%
LPE : 2,70%
Pendapatan per Kapita : 190,00 Jt
Indeks Gini : 0,290

SAMARINDA
Target 2023
IPM : 81,83
Angka Kemiskinan : 4,21%
TPT : 5,36%
LPE : 7,50%
Pendapatan per Kapita : 89,75 Jt
Indeks Gini : 0,290

BALIKPAPAN
Target 2023
IPM : 80,11
Angka Kemiskinan : 2,40%
TPT : 7,30%
LPE : 5,50-6,00%
Pendapatan per Kapita : 193,30 Jt
Indeks Gini : 0,300

PENAJAM PASER UTARA
Target 2023
IPM : 72,70
Angka Kemiskinan : 6,90%
TPT : 5,04%
LPE : 4,03%
Pendapatan per Kapita : 61,36 Jt
Indeks Gini : 0,280

PASER
Target 2023
IPM : 74,13
Angka Kemiskinan : 7,89%
TPT : 3,17%
LPE : 5,01%
Pendapatan per Kapita : 198,84 Jt
Indeks Gini : 0,290

3

PRIORITAS

PEMBANGUNAN KALTIM PERIODE 2019-2023

Prioritas Pembangunan

(Strategy Focused Organization)

Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi

Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan

Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi

Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19

CAKUPAN PERUBAHAN RPJMD

RKPD 2021

Tema 2021:
"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

RKPD 2022

Tema 2022:
"Penguatan daya saing daerah guna mendukung IKN"

RKPD 2023

Tema 2023:
"Penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat"

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2021

- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi
- Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
- Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
- Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja
- Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik
- Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi COVID-19

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2022

Optimalisasi kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup dan penataan Ruang

Optimalisasi peningkatan produktivitas pertanian menuju ketahanan pangan daerah

Optimalisasi pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan

Optimalisasi kapabilitas proses perizinan, pengendalian rencana investigasi, dan pengelolaan produk-produk unggulan

Optimalisasi daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan terkait komoditi unggulan

Optimalisasi fungsi layanan, tata kelola, dan kapasitas aparatur publik

Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM melalui penggunaan teknologi informasi

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan kemudahan berinvestasi

Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan pelaku usaha sesuai dengan sektor terkait komoditi unggulan

Optimalisasi promosi dan investasi komoditi unggulan non-migas dan non-tambang

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2023

4 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kawasan Prioritas Pengembangan Ekonomi

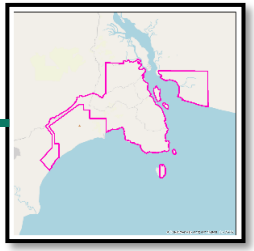

KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya.

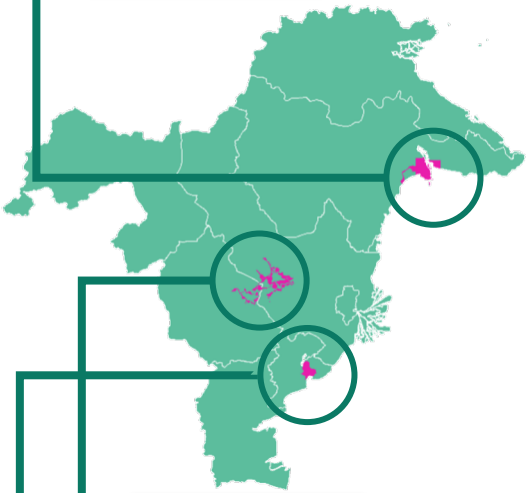

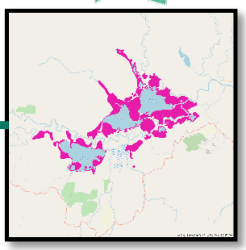

KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan, pengembangan *direct call* terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja	Mahulu, Kutim, Paser, Kubar
	Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	
	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT	
	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	10 Kabupaten/Kota
	Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh	Mahulu, Kutim, Paser, Kubar
	Pengembangan perpustakaan berbasis IT	10 Kabupaten/Kota
Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	10 Kabupaten/Kota
	Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	10 Kabupaten/Kota
	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
	Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan	Bontang, PPU, Berau

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	Paser, Kubar, Kutim, PPU, Mahulu
	Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	
Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Balikpapan, Bontang, Samarinda, Kutim, Kukar, PPU, Paser dan Berau dan Kubar
	Peningkatan keterampilan angkatan kerja	
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	10 Kabupaten/Kota
	Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	10 Kabupaten/Kota
	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi	Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Penajam
	Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor	
	Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor	
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kukar, PPU, Paser, Kutim, dan Berau
	Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	10 Kabupaten/Kota

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	PPU, Kukar, Paser, Kutim, Berau, Kubar
	Pengembangan Kawasan Peternakan	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak	
Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	Kukar, Kutim, Paser, Berau, Kubar dan PPU
	Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan	Paser, Kukar, Kutim dan Kubar
	Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	Paser, PPU, Kutim, Kubar, Berau, Kukar, Mahulu
	Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
	Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Balikpapan, PPU, Paser, Kubar
	Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
	Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	Berau, Bontang
Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Balikpapan, Kukar, Kutim, Kubar, Berau, PPU, Paser dan Mahulu
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik Pemantauan komitmen perizinan peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	10 Kabupaten/Kota

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	10 Kabupaten/Kota
	Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
	Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
	Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	Berau, Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
	Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	Berau, Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Penggembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik	Kuliner = Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara Fashion & Kriya = Samarinda, Kutai Barat, Berau, Balikpapan Film & Musik = Samarinda, Kutai Kartanegara
Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau
	Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi	Balikpapan, Kutai Timur
Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau
Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana air baku	Kutai Kartanegara, Paser
	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara
Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Paser, Kutai Timur
Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN	PPU, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda
	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	10 Kabupaten/Kota
Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kukar, Kutim, Kubar, Berau, Paser dan Mahulu
Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	Kukar, Kutim, Kubar, Berau, Paser dan PPU
	Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	10 Kabupaten/Kota
Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	10 Kabupaten/Kota
	Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS WILAYAH

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik	Samarinda luar provinsi
Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	Samarinda luar provinsi
	Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan	
	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	
Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Samarinda, Balikpapan dan Provinsi
	Peningkatan kapabilitas APIP	
Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi?	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	10 Kabupaten/Kota
	Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	

RINGKASAN EKSEKUTIF